

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

Mareitha Ayu Paramaysela¹ Abdul Hamid² Maksum³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIM18810491

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118097201

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1125086601

E-mail: mmareitha@gmail.com

ABSTRAK

Penulis membuat skripsi tentang IMB yaitu dikarenakan banyaknya orang yang tidak mengetahui proses pengurusan IMB dan terkendalanya biaya yang harus dikeluarkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang IMB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana proses izin mendirikan bangunan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, 2) Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembuatan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013 Tentang retribusi izin mendirikan bangunan di kawasan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut perumahan dan penataan ruang yang sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh DPMPTSP dimana masyarakat wajib untuk mengurus IMB guna untuk melegalkan bangunan yang sedang mereka bangun, namun masih ada masyarakat yang mendirikan bangunan tidak memiliki IMB. Padahal IMB memiliki dampak yang baik bagi pemilik bangunan dan menjamin bangunan mereka, berikutnya adanya kemampuan pelaksana diambil saat bersosialisasi kepada masyarakat guna agar masyarakat mau untuk mengurus IMB, dan melakukan pembangunan sesuai dengan peraturan daerah yang ada, dan terakhir adanya pendayagunaan sumberdaya disini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengurusan IMB, seperti kepala desa dan camat, karena mereka juga memberikan legalisasi dalam berkas yang akan diurus. Keengganan masyarakat mengurus IMB karena masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam proses prosedur pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan oleh sebab itu di diharapkan untuk memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya IMB.

Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Faktor Penghambat, perizinan Penataan Ruang

ABSTRACT

Planning The author wrote a thesis about IMB because there were many people who did not know about the process of obtaining an IMB and the costs that had to be incurred. So the writer is interested in doing thesis research about IMB. This study aims to find out: 1) What is the process for a building permit in Pelaihari District, Tanah Laut Regency, 2) What factors are the obstacles in obtaining a building permit in Pelaihari District, Tanah Laut Regency. The results of this study indicate that the local regulation of Tanah Laut Regency Number 14 of 2013 concerning building permit fees in the Pelaihari District area of Tanah Laut Regency housing and spatial planning has been implemented. This can be seen from the Implementation of the Building Permit Retribution carried out by DPMPTSP where the community is required to take care of the IMB in order to legalize the building they are building, but there are still people who construct buildings without having an IMB. Even though the IMB has a good impact on building owners and guarantees their buildings, then there is the ability of the implementer to be taken when socializing with the community so that the community wants to take care of the IMB, and carry out development in accordance with existing local regulations, and finally there is the utilization of resources here there are several parties those involved in obtaining the IMB, such as village heads and sub-district heads, because they too provide legalization in the file to be taken care of. The community's reluctance to take care of the IMB is due to the lack of public knowledge in the process of registering a building permit, therefore it is expected to provide socialization or guidance to the community about the importance of an IMB.

Keywords: Building Permit, Inhibiting Factors, Licensing, Spatial

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Rozal, (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Adrian Sutedi. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:
Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika

Husni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah*. Jakarta:

Ibid

Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muhammad Akib. (2014). *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*.
Raja Grafindo Persada

Rajawali Pers

Salemba Empat

Sanuasi Has. (1976). *Pengantar Penologi*. Medan: Manore

Sinar Grafika

Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*. Jakarta:

Surhayadi dan Purwanto. (2016). *Sistematika Untuk Ekonomi*. Jakarta:

Teguh Wicaksono. (2005). *Konsep Pembangunan Perkotaan Indonesia*. Jakarta: LP3IS

Wiratna, Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Y.Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan Problem dan upaya Pembenahan*. Jakarta: PT.Grasindo

Jurnal

Alfiansyah (2020). *Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan*

Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Tunggal Berdasarkan PERDA Nomor 3

Haromin, Adi Ramdhani Khaerudin. *Implementasi Penerbitan Izin Mnedirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bandung Barat*

Irfandi. *Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar*

Nurul Agus Irawan. *Implementasi Aturan Ijin Mendirikan Bangunan Di Kawasan Sekitar Bencana Lumpur Sidoarjo*

Risma Nasir. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Izin Mendirika Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng) (DPMPTSP) Kota Makassar*

Website

Laily Eka Trisdianti. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*

<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/804>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21563/21269>

<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/193>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2013 Tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan